

Term of Reference

Produksi Video Dokumenter tentang Pembela HAM

I. Latar Belakang

Pembela hak asasi manusia (HAM) adalah tulang punggung perubahan. Mereka aktif memajukan dan memperjuangkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan fundamental lewat pemantauan, pengorganisasian, pembelaan, dan pemberdayaan. Mereka juga melakukan kampanye, lobi, dan advokasi di tingkat lokal dan nasional sebagai upaya memengaruhi proses pembuatan kebijakan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tak melanggar prinsip-prinsip HAM. Pembela HAM dapat berasal dari berbagai latar belakang seperti petani, buruh, jurnalis, peneliti, akademisi, pekerja seni, advokat, dan lain-lain.

Meski memiliki peran besar, pembela HAM menghadapi risiko tinggi dalam melakukan kerja-kerjanya. Mereka acap menerima ancaman serta kerap menjadi korban penganiayaan, kriminalisasi, kekerasan, penculikan, dan bahkan pembunuhan hanya karena mempertahankan hak-hak yang telah dijamin Konstitusi. Di sisi lain, pemerintah belum merespon situasi itu dengan optimal. Pemerintah bahkan cenderung lalai dalam memenuhi hak-hak warga. Apalagi, di Indonesia, belum ada mekanisme perlindungan bagi pembela HAM yang komprehensif, termasuk di sektor lingkungan.

KEMITRAAN Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan melalui Program “Perlindungan Pembela HAM untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” mendorong pemerintah untuk memperbaiki mekanisme perlindungan bagi pembela HAM melalui pembentukan kebijakan dan penguatan institusi. Tak berhenti di situ, bekerja sama dengan sejumlah mitra di tingkat lokal, KEMITRAAN juga mendukung perlindungan dan pemberdayaan pembela HAM di akar rumput lewat advokasi dan peningkatan kapasitas. Melalui implementasi program ini, KEMITRAAN juga berupaya meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu perlindungan pembela HAM. KEMITRAAN percaya, upaya-upaya tersebut dapat mewujudkan perlindungan bagi pembela HAM, termasuk di sektor lingkungan, dan menciptakan situasi di mana mereka dapat melakukan kerja-kerjanya, mempromosikan dan memajukan HAM, dengan aman.

Untuk memperkuat dan memperluas gaung advokasi, serta meningkatkan perhatian dan kesadaran publik tentang isu pembela HAM di Indonesia, KEMITRAAN hendak memproduksi sebuah film dokumenter yang mengangkat cerita perjuangan komunitas dampingan mitra lokal Program “Perlindungan Pembela HAM untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” di lapangan dan kondisi perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu, film dokumenter ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung proses kampanye dan advokasi kebijakan terkait mekanisme perlindungan bagi pembela HAM dari negara, serta menumbuhkan inspirasi bagi pembela HAM akar rumput yang tengah menghadapi perjuangan serupa. Merespon kebutuhan itu, KEMITRAAN membuka peluang kerja sama dengan Vendor Penyedia Jasa untuk memproduksi film dokumenter tersebut.

Vendor terpilih akan membuat sebuah film dokumenter yang berfokus pada perjuangan komunitas dampingan mitra lokal KEMITRAAN di Sumatera Barat (Sawahlunto) dan Jawa Tengah (Sukoharjo) dalam mempertahankan haknya dari ancaman perusahaan, baik tambang maupun kelapa sawit, dan upaya perlindungan dan keamanan yang mereka terapkan di komunitasnya. Cerita dari lapangan tersebut kemudian dikontekskan dengan kondisi dan kebijakan

perlindungan bagi pembela HAM yang ada di Indonesia. Target dari film dokumenter ini adalah pengambil kebijakan, para pembela HAM, baik di level lokal maupun nasional, yang tengah menjalani perjuangan serupa, dan kelompok masyarakat yang belum banyak terpapar isu pembela HAM.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pembuatan film dokumenter ini antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik tentang isu pembela HAM di Indonesia, khususnya terkait pentingnya perlindungan bagi pembela HAM sektor lingkungan;
2. Menjadi alat kampanye untuk mendukung advokasi kebijakan terkait mekanisme perlindungan bagi pembela HAM;
3. Menumbuhkan inspirasi bagi pembela HAM akar rumput yang tengah menghadapi perjuangan serupa.

III. Keluaran

Keluaran utama dari kegiatan ini adalah sebuah film dokumenter yang menceritakan perjuangan komunitas dampingan mitra lokal Program “Perlindungan Pembela HAM untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” di lapangan dan kondisi perlindungan HAM di Indonesia dengan durasi 30-40 menit. Dalam menghasilkan keluaran utama tersebut, akan ada beberapa dokumen lain yang juga akan dihasilkan seperti:

1. Linimasa dan rencana kerja detail, *storyline, script, & storyboard*;
2. Anggaran dan jadwal pengambilan gambar;
3. Draft awal film dokumenter;
4. Draft akhir film dokumenter;
5. Dokumen-dokumen proyek dan materi mentah film (*video footages, music, voice over, aset, termasuk HDD, dll*).

IV. Indikator

Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya sebuah film dokumenter tentang perjuangan komunitas dampingan mitra lokal KEMITRAAN dalam mempertahankan haknya dari ancaman perusahaan, baik tambang maupun kelapa sawit, dan upaya perlindungan dan keamanan yang mereka terapkan di komunitasnya. Film dokumenter ini akan digunakan sebagai alat kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan dukungan terhadap advokasi kebijakan terkait mekanisme perlindungan bagi pembela HAM.

V. Milestone

Tersampainya cerita tentang perjuangan komunitas dampingan mitra lokal KEMITRAAN dalam mempertahankan haknya dari ancaman perusahaan kepada publik.

VI. Kualifikasi

1. Memiliki pengalaman minimal tujuh tahun dalam produksi film dokumenter, mulai dari penulisan, pengambilan gambar, hingga penyuntingan
2. Terbiasa bekerja dengan menggunakan peralatan produksi film berkualitas seperti kamera, pencahayaan, suara, dan penyuntingan
3. Memiliki kemampuan bekerja dengan waktu yang ketat dan tetap bisa menghasilkan produk berkualitas
4. Memiliki kemampuan menggali informasi dari warga di akar rumput

5. Memiliki pengalaman membuat film dokumenter di wilayah yang ditentukan dan/atau mengangkat isu hak asasi manusia menjadi nilai tambah
6. Mampu memberikan saran dan ide kreatif kepada KEMITRAAN demi menghasilkan produk dengan kualitas terbaik
7. Memiliki akte pendirian usaha, izin usaha, dan nomor NPWP organisasi/perusahaan

VII. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Produksi film dokumenter akan dilakukan oleh vendor dalam kurun waktu tiga (3) bulan sejak penandatanganan kontrak yang diharapkan dilakukan pada pekan terakhir Juni hingga pekan terakhir September 2021.

VIII. Penyampaian Proposal

Calon Vendor pelaksana diharapkan untuk menyiapkan dan mengirimkan sebuah proposal yang di dalamnya mencakup informasi tentang:

1. Usulan konsep kreatif film dokumenter yang akan diproduksi. KEMITRAAN menerima ide dan saran kreatif dalam penyampaian cerita yang berdampak dan inovatif.
2. CV beserta informasi tanggung jawab fungsional dari setiap anggota tim yang akan terlibat di dalam proses produksi film dokumenter.
3. Portofolio tim yang di dalamnya memuat informasi pengalaman kerja vendor, termasuk tautan film dokumenter yang pernah diproduksi yang paling relevan dengan topik pembela HAM.
4. Rencana kerja dan linimasa produksi film dokumenter untuk semua fase – persiapan, pengambilan gambar, penyuntingan, dan lainnya.
5. Detail biaya produksi film dokumenter, termasuk anggaran perjalanan, pengambilan gambar, penyuntingan, honor tim produksi, dan lainnya.

Dokumen Proposal beserta Surat Ketertarikan dapat disampaikan paling lambat pada **tanggal 17 Juni 2021** ke alamat email julio.castor@kemitraan.or.id sebagai *Program Officer* dan ega.rosalina@kemitraan.or.id selaku *Communication Officer* Program Perlindungan Pembela HAM untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dengan judul email **Film Dokumenter HRD_(Nama Vendor)**.